

## STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI KETIMPANGAN SOSIAL DAN BUDAYA

M. Nashirul Haqqi<sup>1</sup>, Abdul Ghani Rasyid<sup>2</sup>

[nashirulhaqqi572@gmail.com](mailto:nashirulhaqqi572@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdulghanirasyid0@gmail.com](mailto:abdulghanirasyid0@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta akar ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan nasional, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasinya, serta merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur yang relevan dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, dan Kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya efektif dalam menghapus ketimpangan karena lemahnya implementasi dan kurangnya pelibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan pendidikan yang berbasis konteks sosial-budaya, pelatihan guru yang adaptif, serta integrasi kurikulum yang menghargai keragaman lokal sebagai langkah menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan transformatif.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Keadilan Sosial, Inklusivitas, Konteks Sosial-Budaya, Kurikulum Merdeka.

### PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan bangsa karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumentasi pembentukan karakter, pemberdayaan sosial, serta penguatan kohesi budaya. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki beragam keanekaragaman geografis, sosial, budaya dan sistem pendidikan seharusnya dirancang agar semua orang memiliki akses yang sama. Dan kualitas bagi seluruh peserta didik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan budaya masih menjadi tantangan besar yang menghambat tercapainya keadilan pendidikan. Ketimpangan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan akses. Perbedaan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hingga keterbatasan dalam kurikulum nasional yang tidak bisa menyertakan kekayaan budaya secara cukup lokal. Siswa di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik dan teknologi yang memengaruhi kualitas rendah. Pembelajaran di sisi lain, siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah juga mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan karena beban biaya yang berat tertutupi oleh bantuan sosial secara efektif. Selain itu, keseragaman kurikulum nasional menyebabkan banyak komunitas budaya merasa tidak didengar dalam materi pembelajaran yang bisa merusak identitas lokal dan mengurangi kekuatan budaya setempat memperdalam marginalisasi budaya. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, termasuk Kurikulum Merdeka, sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, penerapan kebijakan seringkali tidak berhasil karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial-budaya yang berbeda di setiap wilayah. Hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa ketimpangan belum sepenuhnya dikurangi, bahkan terkadang menimbulkan ketimpangan struktural baru. Di Indonesia, ketimpangan pendidikan adalah hasil dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung secara historis dan struktural, bukan fenomena

yang muncul secara kebetulan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa elemen seperti kemiskinan, keterpencilan geografis, dan marginalisasi budaya sangat berperan dalam membatasi akses dan kualitas pendidikan kelompok masyarakat tertentu. Fukaro (2025) menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan terkait erat dengan struktur sosial yang tidak stabil, di mana orang-orang dari kelas bawah seringkali terperangkap dalam siklus ketidakadilan pendidikan. Karena kurangnya kemampuan keuangan dan dukungan institusional. Namun, pendekatan multikultural dalam pendidikan semakin diakui sebagai solusi untuk tantangan keberagaman di Indonesia. Anwar (2024) menyatakan bahwa sistem pendidikan yang seragam dan tidak kontekstual telah mengabaikan perbedaan budaya lokal. Pada akhirnya, ini berdampak pada keterasingan siswa saat belajar. Pendidikan berisiko menjadi alat asimilasi paksa daripada ruang pemberdayaan jika kurikulum dan kebijakan pendidikan tidak mencerminkan identitas sosial-budaya siswa.

Asrulla, Sari, dan Mahardika (2025) juga mengatakan bahwa meskipun kebijakan pendidikan nasional selama ini bertujuan untuk memberikan pemerataan, mereka seringkali tidak efektif karena tidak mempertimbangkan realitas sosial dan tradisi lokal. Meskipun program seperti zonasi atau bantuan pendidikan sangat penting, mereka seringkali didistribusikan secara tidak tepat sasaran dan tidak menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Ini sejalan dengan penemuan Calista dan Kondo (2025), yang menyatakan bahwa pemerataan pendidikan hanya akan menjadi wacana normatif tanpa strategi berbasis data sosial dan partisipasi masyarakat yang aktif. Selain itu, Mujiburrohmah dan Putri (2025) menekankan bahwa salah satu penyebab struktural dari kualitas pendidikan yang buruk di daerah tertinggal adalah ketidakseimbangan antara distribusi sarana pendidikan dan alokasi anggaran. Akibatnya, mereka mendorong kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal dan sekolah untuk berperan sebagai pelaku utama dalam mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Dalam situasi seperti ini, pendidikan harus dipandang bukan hanya sebagai tugas administratif atau teknokratis; sebaliknya, pendidikan harus dipandang sebagai alat transformasi sosial yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika dan kompleksitas masyarakat. Agar sistem pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan kebijakan pendidikan yang inklusif, berbasis bukti, dan kontekstual terhadap keberagaman lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana dan di mana ketimpangan sosial dan budaya muncul dalam sistem pendidikan nasional untuk melakukannya, penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan untuk membangun strategi kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dokumen kebijakan pendidikan nasional, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu-isu ketimpangan pendidikan, keadilan sosial, dan kebijakan inklusif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber yang kredibel menggunakan kata kunci seperti "ketimpangan pendidikan", "kebijakan

pendidikan”, “pendidikan inklusif”, dan “kesenjangan sosial budaya”, dengan rentang tahun publikasi 2018 hingga 2025. Literatur yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola kebijakan, serta hubungan antarvariabel yang relevan dalam konteks pendidikan dan ketimpangan sosial-budaya. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menyusun sintesis konseptual dan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan bukti literatur yang kuat, guna menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Realitas Ketimpangan Sosial dan Budaya dalam Pendidikan Nasional**

Kondisi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan akses dan kualitas. Perbedaan kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan budaya antarwilayah telah memunculkan jurang ketimpangan pendidikan yang cukup dalam. Sebagian besar siswa dari daerah-daerah terpencil, komunitas adat, serta keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah cenderung mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara. Ketimpangan ini tidak semata-mata berkaitan dengan sarana fisik seperti bangunan sekolah atau ketersediaan tenaga pengajar, tetapi juga menyangkut isi pembelajaran yang cenderung tidak mencerminkan realitas sosial dan budaya peserta didik. Anak-anak dari komunitas marginal sering kali merasa tidak terwakili dalam materi pembelajaran karena konten pendidikan yang digunakan mengabaikan konteks lokal mereka. Hal ini menimbulkan rasa keterasingan dalam proses belajar yang seharusnya bersifat memberdayakan. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan memiliki posisi strategis sebagai pilar utama yang membentuk masyarakat yang cerdas, adil, dan beradab. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan yang cukup kompleks, baik dari sisi sosial maupun budaya. Ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan terlihat dari perbedaan akses dan kualitas layanan antar-wilayah dan antarkelompok masyarakat. Anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, atau perbatasan sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik profesional, serta kurangnya fasilitas pendukung menjadi penghalang utama bagi mereka untuk menikmati hak pendidikan secara optimal. Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah juga mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan hidup lainnya menjadi beban tambahan yang memperparah ketimpangan ini. Maka tak heran, pendidikan kerap kali hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki modal sosial dan ekonomi lebih tinggi, sementara kelompok rentan justru semakin tertinggal. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemerataan sosial. Ketimpangan budaya dalam pendidikan juga menjadi isu yang tak kalah penting. Globalisasi yang bergerak cepat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara pandang terhadap budaya lokal. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya, justru belum mampu mengakomodasi keberagaman secara utuh. Kurikulum nasional cenderung seragam dan tidak mempertimbangkan kekayaan lokal yang dimiliki setiap daerah. Akibatnya, banyak peserta didik merasa asing dengan isi pembelajaran yang tidak mencerminkan kehidupan sosial budaya mereka. Mereka tidak hanya kesulitan memahami materi, tetapi juga kehilangan koneksi emosional dengan lingkungan belajar. Dalam situasi

seperti itu, pendidikan sering kali tidak berhasil membentuk identitas seseorang.

budaya peserta didik. Alih-alih menjadi ruang untuk merayakan keberagaman, Sekolah justru bisa jadi tempat di mana budaya lokal hilang atau tidak lagi dihargai. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi pendidikan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal. Pendidikan harus mampu menerima dan mengakui berbagai perbedaan yang ada di tengah masyarakat agar tidak menciptakan dominasi budaya tertentu yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik identitas. Di tengah tantangan tersebut pendidikan tetap diyakini sebagai agen perubahan sosial yang kuat. Ia memiliki peran besar dalam membentuk karakter peserta didik, membangun kesadaran kritis, serta. Memupuk nilai-nilai sosial yang mendorong toleransi dan kerja sama. Namun, agar bisa melakukan peran strategis tersebut, sistem pendidikan nasional harus mengalami transformasi mendasar. Pendidikan harus mampu merespons perubahan sosial dan teknologi, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika budaya masyarakat. Tidak cukup hanya dengan memperluas akses, tetapi juga harus memastikan bahwa materi dan cara belajar benar-benar sesuai dan berhubungan dengan konteks dan memberdayakan. Dari sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk merancang kebijakan pendidikan yang tidak hanya berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai manusiawi dan kebutuhan peserta didik dan berbasis keadilan sosial. Realitas ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan nasional di Indonesia masih menghadapi masalah yang rumit dan membingungkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan bukan hanya disebabkan oleh kelemahan administratif, melainkan mencerminkan ketidakmerataan yang bersifat struktural dan sistemik. Mujiburrohmah dan Putri (2025) menunjukkan bahwa cara pembagian uang untuk pendidikan itu meskipun secara nominal meningkat, belum mampu menjangkau secara adil wilayah-wilayah tertinggal. Ketimpangan distribusi fasilitas, rendahnya kapasitas guru, serta kurangnya infrastruktur dasar di daerah yang jauh menyebabkan rendahnya kualitas Pendidikan tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu di wilayah tersebut perkotaan atau dengan status sosial-ekonomi menengah ke atas. Ketimpangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan hal-hal lainnya dengan sistem sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Tatang Muttaqin (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa determinan ketimpangan Pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor multilevel yakni individu, keluarga, sekolah, dan komunitas. Interaksi antara rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, kemiskinan struktural, dan tata kelola pendidikan yang lemah daerah semakin memperdalam jurang ketimpangan. Di banyak wilayah, sekolah masih kesulitan memenuhi standar minimal layanan pendidikan karena keterbatasan yang ada. peran negara dan lemahnya partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, Nur Farida Liyana (2023) menunjukkan bahwa ada ketimpangan. Pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketika pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu, kesempatan mobilitas sosial terbatas, sehingga memperkuat pola stratifikasi sosial yang sudah ada. Dengan kata lain, pendidikan gagal. Berbagai temuan literatur tersebut memperkuat fakta bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan normative atau teknis. Diperlukan transformasi kebijakan yang berbasis pada keadilan struktural, sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal, serta melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk memperkecil jurang ketimpangan, baik dari sisi sosial ekonomi maupun kultural. Ini dapat

diwujudkan melalui kurikulum fleksibel yang mengakomodasi muatan lokal, pelatihan guru yang multicultural penyediaan sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dengan demikian pendidikan di Indonesia benar-benar menjadi alat transformatif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan (Baiti, 2024).

Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam merespons dan mengatasi ketimpangan sosial yang terus berkembang di masyarakat, terutama dalam konteks stratifikasi sosial yang memengaruhi akses terhadap berbagai sumber daya penting seperti ekonomi, pekerjaan, dan layanan publik. Dalam realitasnya, individu yang berasal dari latar belakang ekonomi dan sosial yang lemah kerap mengalami hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik karena keterbatasan fasilitas, biaya, maupun akses informasi. Kondisi ini tidak hanya memperkuat posisi kelompok yang telah mapan secara sosial dan ekonomi, tetapi juga membatasi ruang gerak kelompok yang berada di lapisan bawah untuk melakukan mobilitas sosial secara adil. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa sekadar dipandang sebagai proses akademik semata, melainkan harus dilihat sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu menciptakan keadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperluas peluang hidup yang lebih baik bagi semua lapisan, tanpa terkecuali. Dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas, sistem pendidikan nasional seharusnya mampu menjadi penggerak utama dalam mengurangi ketimpangan sosial dan budaya yang selama ini melekat dalam struktur masyarakat Indonesia (Armansyah, 2024).

Kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat serius, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi rendah dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Realitas ini tampak jelas dari sulitnya akses menuju sekolah, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, hingga minimnya kualitas serta distribusi guru yang profesional. Hanya itu, tekanan ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga memperburuk situasi, sehingga pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara. Banyak sekolah di pedesaan masih beroperasi dalam keadaan tidak layak, dengan bangunan seadanya dan fasilitas yang minim, sementara guru yang bertugas di wilayah tersebut sering kali kekurangan pelatihan dan dukungan yang memadai. Bahkan, masih banyak orang tua yang memandang pendidikan sebatas formalitas dasar, bukan sebagai investasi masa depan, sehingga anak-anak cenderung lebih didorong untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan Pendidikan belum berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih serius, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat untuk mengatasi ketimpangan yang berakar dalam struktur sosial dan budaya bangsa (Hujaimah, 2023)

## **2. Evaluasi Kritis terhadap Respons Kebijakan Pendidikan yang Ada.**

Pemerintah selama ini sudah mengatasi isu ketimpangan dalam bidang pendidikan melalui berbagai kebijakan. Beberapa program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta penerapan sistem zonasi dalam proses penempatan peserta didik baru. PPDB Didik Baru memang menunjukkan komitmen negara untuk itu. memperluas akses pendidikan bagi semua anak. Namun, ketika kebijakan ini diterapkan di lapangan, berbagai kendala muncul. Banyak anak yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdata dengan baik. Sistem zonasi kadang-kadang justru memperkuat ketimpangan karena sekolah yang lebih baik hanya ada di pusat kota-kota. Sementara Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk

fleksibel pun belum mencapai daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang sama untuk semua sering kali tidak baik. Efektif untuk negara yang memiliki tingkat keragaman seperti Indonesia. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk kebijakan afirmatif pemerintah dalam menjawab kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah. Meskipun secara konseptual PIP memiliki tujuan yang mulia, namun pelaksanaannya di lapangan masih dihadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang menyebabkan kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara tujuan dan penerima manfaat terlambatnya pencairan dana, kurangnya sosialisasi kepada orang tua siswa, hingga kendala teknis dalam proses verifikasi data. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak sampai tepat waktu, tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali oleh siswa yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan seperti ini masih jauh dari kondisi nyata masyarakat penerima manfaat. Dari segi pelaksanaannya, program ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang memadai oleh sistem birokrasi yang kuat dan efisien. Peran dinas pendidikan daerah cenderung lemahnya pengawasan dan pengelolaan data menyebabkan beban administrasi menjadi berat sepenuhnya berada dalam pengelolaan sekolah, khususnya operator dan kepala sekolah. Penyaluran dana PIP dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan adanya tren penurunan cukup signifikan di semua jenjang pendidikan. Misalnya, pencairan dana untuk siswa.

Pada tahun 2020, SMK hanya mencapai sekitar 45%. Ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya (Jumanah, 2023). Peningkatan angka putus sekolah secara nasional juga dipengaruhi oleh penurunan ini. Situasi ini menunjukkan upaya pemerataan Pendidikan melalui PIP belum mampu mengatasi kesenjangan yang terjadi, yang menunjukkan kelemahan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di seluruh negeri. Ada beberapa kemajuan dalam evaluasi respons kebijakan pendidikan di Indonesia, tetapi masih ada beberapa masalah penting. Dalam tinjauan evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP), Asnawi et al. (2021) menemukan bahwa, meskipun PIP berhasil meningkatkan partisipasi siswa di SMP dan SMA, program ini kurang efektif di sekolah dasar (SD). Tidak dapat menurunkan tingkat putus sekolah di SD secara signifikan karena mekanisme verifikasi yang kompleks dan jumlah bantuan yang dianggap rendah. Selain itu, Situmorang & Damanik (2025) menemukan bahwa pengumpulan data dan pelaporan formal masih menjadi kunci keberhasilan monitoring dan evaluasi (M&E) dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, tetapi tidak memadai untuk mengukur dampak nyata terhadap kesetaraan akses dan kualitas pembelajaran. Mereka menyarankan agar proses M&E menjadi lebih responsif, berpartisipasi, dan berkelanjutan. Yanti et al. (2024) melihat penilaian Kurikulum Merdeka dan undang-undang afirmatif lainnya. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat meningkatkan akses siswa prasejahtera; namun, organisasi pelaksanaan, sasaran yang tepat, dan dukungan profesional untuk guru masih kurang. Akibatnya, peningkatan kualitas masih dapat dicapai tanpa penguatan infrastruktur dan pelatihan guru yang memadai. Dalam bidang inklusi, penelitian Nowak et al. (2024) tentang kebijakan pendidikan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa partisipasi sosial di sekolah meningkat. Sumber daya dan persiapan guru, bagaimanapun, masih perlu diperkuat agar inklusi berjalan dengan baik dan secara merata.

Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan digital di wilayah pedesaan oleh Lestari et al. (2024) menarik perhatian. Mereka menemukan bahwa, meskipun kebijakan e-learning telah diterapkan, hasil positif yang signifikan telah dihambat oleh ketimpangan infrastruktur dasar (listrik dan internet) serta literasi digital guru dan siswa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tanggapan kebijakan pendidikan seperti PIP, kurikulum merdeka, inklusi, dan digitalisasi menunjukkan keinginan untuk mendukung, ada kekurangan dalam pelaksanaannya (terutama peraturan M&E). Tidak tercapainya tujuan kebijakan secara penuh dapat disebabkan oleh distribusi sumber daya, kesiapan guru, dan akurasi sasaran. Mekanisme pemantauan berbasis bukti dan penajaman diperlukan, menurut evaluasi kritis respons kebijakan ini. Prosedur pembagian, dan peningkatan kemampuan institusi untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual. Secara keseluruhan, evaluasi PIP menunjukkan bahwa kebijakan perlu diperbaiki secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal pendanaan tetapi juga dalam hal manajemen, komunikasi, dan pemantauan. Pemerintah harus memperkuat sistem pendataan yang akurat, mempercepat proses pencairan bantuan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya program ini. Dalam hal pemerataan pendidikan, keberhasilan kebijakan seperti PIP diukur bukan hanya dari jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada keberlanjutan pendidikan siswa miskin. Kebutuhan siswa seharusnya menjadi fokus kebijakan pendidikan, bukan hanya pada tingkat administratif agar tidak ada lagi orang yang terpinggirkan dari hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Kartu yang memfasilitasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada dasarnya, Indonesia Pintar (KIP) adalah upaya pemerintah untuk memastikan hak pendidikan bagi semua warga negara, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha meringankan beban finansial siswa agar mereka dapat kuliah. Meskipun demikian, selama pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah, terdapat sejumlah kendala yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan yang mendasarinya. Tidak sedikit penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat, sementara siswa yang benar-benar membutuhkan tidak didaftarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi masih gagal, yang menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak akurat. Di samping masalah dengan ketepatan sasaran, program juga menghadapi masalah dengan informasi dan bagaimana masyarakat memahaminya. Sebagian besar orang tua siswa tidak memahami fungsi dan manfaat KIP, karena beberapa orang tidak tahu bagaimana mencairnya. Selain itu, proses penyaluran bantuan sering tertunda karena birokrasi yang panjang dan rumit. Jika metode administratif menghambat program yang seharusnya menyelesaikan masalah, kebijakan itu sendiri mungkin tidak efektif. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa tanggapan terhadap kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari kebijakan yang telah dibuat, tetapi juga dari seberapa baik kebijakan dapat diterapkan secara merata, transparan, dan berkelanjutan di berbagai wilayah. Daerah di Pulau Jawa dan Sumatera masih menerima manfaat PIP, sementara wilayah di timur Indonesia justru menerima alokasi yang lebih rendah.

Namun, berdasarkan indikator kesejahteraan dan kebutuhan akses pendidikan, wilayah timur memiliki kebutuhan yang lebih besar. Ketidakesesuaian distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan di seluruh provinsi, keadilan dan pemerataan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan seperti PIP sangat penting untuk menilai kinerja

administrasi dan memastikan bahwa tujuan utama ke-bijakan, yaitu pemerataan dan keadilan pendidikan, dirasakan oleh seluruh masyarakat, teru-tama mereka yang paling membutuhkan pemerintah menanggapi masalah ketimpangan akses pendidikan dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Pe-serta Didik Baru (PPDB). Sistem ini dirancang untuk membuat distribusi siswa adil, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan memperkuat posisi institusi pendidikan yang sebelumnya tidak mendapat perhatian yang cukup. Dengan zonasi, diharapkan biaya pen-didikan, terutama biaya transportasi, akan turun lebih ringan dan siswa didistribusikan secara merata. Namun, dalam kenyataannya, sistem zonasi masih menghadapi banyak tan-tangan teknis dan struktural. Salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan sekolah negeri di seluruh wilayah, yang membuat siswa di daerah tertentu sulit mengikuti ketentuan zonasi untuk pergi ke sekolah. Akibatnya, anak-anak yang tinggal di daerah dengan fasilitas terbatas tidak dapat menerima pendidikan yang adil (Mashrul, 2024).

### **3. Strategi Kebijakan Pendidikan yang Responsif terhadap Konteks Sosial dan Budaya**

Pendidikan harus dilihat sebagai ruang yang dinamis dan fleksibel untuk menjawab tantangan lokal daripada sistem yang kaku dan sentralistik. Daerah harus diberi otoritas yang lebih besar untuk pendidikan yang disesuaikan dengan ciri-ciri masyarakatnya. Agar anak-anak merasa terhubung dengan apa yang mereka pelajari, kurikulum harus diisi dengan nilai-nilai lokal. Selain mengajar berdasarkan standar akademik nasional, guru harus dilatih untuk memahami konteks sosial-budaya siswa mereka. Agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran, strategi kebijakan juga harus dibuat berdasarkan data spesifik dari masing-masing wilayah. Selain itu, pelibatan tokoh adat, masyarakat lokal, dan organisasi sipil sangat penting untuk membangun kebijakan yang partisipatif dan inklusif. Dengan metode ini, pendidikan tidak hanya akan berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, tetapi juga akan berfungsi sebagai cara untuk mengatasi perbedaan sosial dan menjaga keanekaragaman budaya sebagai kekuatan yang dapat dimanfaatkan bersama. Dalam hal strategi, kebijakan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan efektivitas strategi pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai peraturan administratif dalam hal ini, tetapi juga sebagai alat untuk trans-formasi pendidikan yang mampu mengikuti kemajuan teknologi, sosial, dan budaya masyarakat. Kebijakan pendidikan yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan berfokus pada kebutuhan siswa. Kebijakan yang berbasis realitas sosial digunakan di berbagai wilayah untuk mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran, peran aktif guru, dan penguatan kurikulum yang relevan. komunitas dalam mendukung proses pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan pendidikan kontekstual dapat mempersempit perbedaan sosial dan budaya di dunia pendidikan sekaligus menjawab tantangan zaman (Hendrawati, 2024).

Selain menekankan betapa pentingnya mengembangkan strategi pembelajaran baru, juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, pendidik, siswa, dan komunitas lokal. Ko-laborasi lintas tingkat ini dianggap penting untuk menjadikan pendidikan sebagai ruang yang terbuka terhadap perbedaan, menghargai keberagaman budaya, dan menjawab kebu-tuhan kerja dan tantangan di seluruh dunia. Kebijakan yang mendukung pembelajaran ber-basis proyek, kurikulum yang fleksibel, pendekatan multikultural, Selain itu, penggunaan teknologi secara merata akan membuat sistem

pendidikan lebih fleksibel dan tanggap terhadap perubahan masyarakat. Akibatnya, pendekatan kebijakan pendidikan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh undang-undangnya, serta bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan situasi sosial dan budaya yang ada di setiap wilayah Indonesia. Pendidikan sangat penting untuk memecahkan rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial yang diwariskan. Pendidikan membantu orang memperbaiki kondisi hidup mereka secara berkelanjutan dengan memberi mereka keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan formal, tetapi juga mampu mengatasi ketidaksetaraan sosial yang menghalangi sebagian kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan tersebut. Untuk pendidikan dapat berfungsi sebagai apa pun, kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap wilayah. sarana untuk transformasi sosial. Kebijakan pendidikan yang dapat disesuaikan dengan masyarakat lokal harus mempertimbangkan banyak hal, seperti budaya masyarakat, keadaan geografis, dan nilai-nilai yang berbeda. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, diperlukan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan di wilayah perkotaan. Strategi untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif termasuk meningkatkan akses ke pendidikan anak usia dini, melatih guru dengan pendekatan multikultural, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang tumbuh dalam lingkungan mereka (Sarjito, 2024).

Program seperti bantuan pendidikan tunai telah menunjukkan dampak yang cukup besar dalam mendukung anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk melanjutkan sekolah mereka. Kebijakan jenis ini, bagaimanapun, sangat bergantung pada bagaimana metode pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkungan sosial dan budaya penerima manfaatnya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial; oleh karena itu, rencana kebijakan harus fokus pada keberagaman dan inklusi sebagai komponen penting dari sistem. Pendidikan hanya dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial yang menjangkau semua orang, bukan hanya mereka yang sudah berada dalam posisi yang menguntungkan, hanya dengan mengambil pendekatan yang peka terhadap realitas masyarakat. Dalam literatur akademik, ada bukti bahwa penerapan strategi kebijakan pendidikan yang berorientasi budaya, kontekstual, dan inklusif di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif. Menurut In Wahyuni dan Muhibbin (2024), penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan literasi siswa sosial, keterlibatan aktif, dan kemampuan berpikir kritis, meskipun tantangan fasilitas dan waktu belajar masih menjadi kendala. Hasil ini menunjukkan bahwa, sebagai strategi kebijakan pendidikan yang relevan, guru harus dilatih dan media pendidikan harus berbasis budaya lokal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan dalam akses dan fasilitas, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain. juga mencakup representasi identitas budaya dalam proses pembelajaran, kebijakan, dan elemen kurikulum. Faktanya menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemerataan sosial, terutama bagi keluarga miskin, komunitas adat, dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Kebijakan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, Kurikulum Merdeka, dan program pendidikan inklusif telah dievaluasi. Hasilnya

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan, ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Faktor utama yang menghambat termasuk ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi, kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Efektivitas kebijakan tersebut. Kajian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pergeseran paradigma kebijakan pendidikan telah berubah dari pendekatan yang seragam dan teknokratis menuju pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada realitas sosialbudaya masyarakat lokal. Strategi kebijakan pendidikan yang efektif harus mencakup pelatihan guru yang berbasis budaya lokal, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kondisi daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas akan menjadi lebih baik. Salah satu langkah penting menuju pendidikan nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia adalah reformasi kebijakan yang berpusat pada keadilan struktural dan keberagaman lokal. juga mencakup representasi identitas budaya dalam proses pembelajaran, kebijakan, dan elemen kurikulum. Faktanya menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemerataan sosial, terutama bagi keluarga miskin, komunitas adat, dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Kebijakan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, Kurikulum Merdeka, dan program pendidikan inklusif telah dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan, ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Faktor utama yang menghambat termasuk ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi, kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Efektivitas kebijakan tersebut. Kajian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pergeseran paradigma kebijakan pendidikan telah berubah dari pendekatan yang seragam dan teknokratis menuju pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada realitas sosialbudaya masyarakat lokal. Strategi kebijakan pendidikan yang efektif harus mencakup pelatihan guru yang berbasis budaya lokal, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kondisi daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas akan menjadi lebih baik. Salah satu langkah penting menuju pendidikan nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia adalah reformasi kebijakan yang berpusat pada keadilan struktural dan keberagaman lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2024). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 6(1), 35–48.
- Armansyah. (2024). Implementasi sistem pendidikan dalam mengatasi ketidaksetaraan; Pengaruh terhadap stratifikasi sosial. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 1–9.
- Asnawi, A. R., Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's education outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.30363>
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi kebijakan pendidikan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan budaya. *PEMA*, 5(2), 551-565.
- Sarjito, A. (2024). Implikasi kebijakan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. *Jurnal Loyalitas Sosial*, 6(2), 100-123.